

## BAB V

### KESIMPULAN

Seperti telah berulang kali dinyatakan PM Howard, hubungan Australia dengan Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Sebab, sebagai tetangga terdekat di bagian utara, Indonesia dapat berperan sebagai semacam zona pengaman bagi Australia dari berbagai ancaman, baik ancaman politik dan keamanan maupun ancaman ekonomi dan perdagangan, yang mungkin datang dari negara-negara Asia lain yang terletak lebih ke utara.

Bagaimanapun, hubungan baik yang terjadi saat ini baru terjalin di antara kedua pemimpin bangsa dan jajaran pemerintahannya. Pergantian kepemimpinan nasional, baik di Indonesia maupun Australia, bukan tak mungkin akan mengubah lagi atmosfer persahabatan yang kini tengah berada di puncaknya ke arah suasana tak bersahabat yang akan membawa kerugian bagi kedua pihak.

Hubungan baik tersebut akan semakin kuat apabila Australia menjalankan komitmen seperti yang serinbg dilointarkan para menteri Indonesia dalam AIMF yaitu:

*Pertama*, tidak mencampuri urusan dalam negeri RI. Artinya, kecenderungan Howard suka "usil" mencoba-coba memengaruhi kebijakan RI, sebagaimana tampak (misalnya) pada *statement*-nya yang mengatakan bahwa "sikap RI memerangi terorisme melemah" (Oktober 2001), harus diakhiri. Itu juga berarti Australia tidak melibatkan diri (alias tidak menjadi provokator) dalam

Maluku. Terus terang RI pernah -dan bahkan mungkin masih- mencurigai Canberra ikut bermain "api" di daerah "panas" macam Papua dan Maluku.

*Kedua*, menegaskan kembali dukungan penuhnya atas keutuhan wilayah NKRI. Memang, Australia sudah berulang kali menyatakan dukungannya itu. Tapi tak ada salahnya kalau Howard untuk kali kesekian mau menegaskan lagi dukungannya itu, sebagai salah satu bukti Canberra betul-betul tidak memprovokasi terjadinya konflik horisontal di Papua, Poso, dan Maluku.

*Ketiga*, dapat memahami keberatan RI atas pemakaian "diplomasi publik" oleh pemerintah Australia dalam upaya menyelesaikan beragam isu bilateral, seperti imigran gelap dan pengungsi Timtim di Timor Barat (NTT). Menurut Menlu Hassan Wirajuda, diplomasi publik adalah berdiplomasi melalui media massa dan tidak melakukannya secara langsung dengan pihak berkepentingan. Akibatnya, isu yang muncul belum bisa diatasi melalui negosiasi, tapi kalangan pers khususnya sudah heboh.

Bukan mustahil di masa depan Australia akan kembali dikuasai pemimpin ultra konservatif, sikap yang sedikit banyak sempat ditunjukkan PM Howard di masa-masa awal kepemimpinannya. Sebaliknya, di Indonesia sikap kurang bersimpati terhadap Australia kadang juga muncul di antara sebagian warga, yang menyesalkan sikap Australia yang dianggap terlalu dekat dengan AS, negara